



IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA HARAPAN (KB) DI DESA KARANGMANGU KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS

¹ Andri Trianfano, ² Suryoto, ³ Sartono

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

andritrianfanofisip@gmail.com suryotofisip@gmail.com sartonofisip@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of the Family Planning Village Program in Karangmangu Village, Purwojati District, Banyumas Regency. The purpose of this study is to explain and describe the implementation of the Family Planning Village Program (KB) in Karangmangu Village. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. To determine the informants in this study, it was done using a purposive technique, namely the informants who were deliberately selected by the researchers. The results of this study indicate that the communication that exists between the implementor and the target group is quite good, but still needs improvement in the coordination pattern, starting from reporting to evaluation. Then, the human resources that are owned are sufficient enough, but still needs to be done to improve the program facilities. The response and understanding of the implementer regarding the village family planning program is quite good.

Keywords: Karangmangu, KB Village, Policy Implementation.

A. PENDAHULUAN

Angka kemiskinan merupakan tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak negara berkembang di Dunia. Kemiskinan tergolong masalah krusial, khususnya bagi negara berkembang, meskipun produksi dan pendapatan nasional sudah memenuhi batas minimum (Yacoub, 2012). Angka kemiskinan tidak jarang dipengaruhi oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu negara. Indonesia menempati urutan ke empat negara terpadat di Dunia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika, akumulasi jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak

270.203.920 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sejumlah 268.074.560 jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia membutuhkan perhatian khusus, karena jika tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan menghambat proses pembangunan. Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah mengimplementasikan program keluarga berencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 (delapan) mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang berbunyi “keluarga berencana merupakan usaha pengaturan atas kelahiran anak, jangka waktu dan usia melahirkan, merencanakan kehamilan, mendapatkan perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak yang dimiliki demi tercapainya keluarga yang berkualitas”).

Kabupaten Banyumas adalah Kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikan kebijakan keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB. Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah rumah tangga tinggi adalah Kecamatan Purwojati. Berikut merupakan data jumlah rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut desa di Kecamatan Purwojati 2020:

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Purwojati 2020.

No.	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga
1.	Gerduren	1.132	3,68
2.	Karangtalun Kidul	1.270	3,71
3.	Kaliurip	548	3,57
4.	Karangtalun Lor	589	3,47
5.	Purwojati	1.212	3,64
6.	Klapasawit	451	3,63
7.	Karangmangu	1.367	4,29
8.	Kaliputih	628	3,48
9.	Kaliwangi	1.042	3,46
10.	Kalitapen	1.347	3,50
Jumlah		9.586	3,64

Sumber : Kecamatan Purwojati, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa Desa Karangmangu merupakan desa dengan jumlah rumah tangga tertinggi, yaitu sebanyak 1.367, sementara rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4,29 persen. Desa Karangmangu merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Program Kampung KB. Alasan yang mendasari pelaksanaan program tersebut tidak hanya tingginya jumlah rumah tangga yang dimiliki,

namun berdasarkan survey pendahuluan diketahui bahwa terdapat satu dusun di Desa Karangmangu yang memiliki angka pencapaian KB paling rendah, yaitu Kalikranji.

Program kampung KB di Desa Karangmangu dalam pelaksanaannya masih menuai berbagai kendala, diantaranya adalah (1) terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja); (2) minimnya fasilitas dalam implementasi program kampung KB, khususnya dalam pengadaan rumah dataku dan sekretariat pokja kampung KB sehingga belum tersusun mekanisme operasional yang baku; (3) kurangnya koordinasi dan komitmen dari berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Karangmangu; kemudian masalah yang terakhir adalah belum tersusunnya struktur kepengurusan atau kelompok kerja KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana). Berdasarkan berbagai fakta empiris tersebut, dalam penelitian ini diteliti secara lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan purwojati Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 4 (empat) faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai acuan analisis permasalahan penelitian, diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Subarsono, 2005:90-92).

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sementara teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Desa Karangmangu Kecamatan purwojati Kabupaten Banyumas. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, digunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data: (a) informan, (b) tempat dan peristiwa, dan (c) dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Demi tercapainya keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan 4 (empat) kriteria yaitu : (a) derajat kepercayaan, (b) transferabilitas data, (c) dependabilitas data, dan (d) konfirmabilitas data (Moleong, 1990).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan publik yang sampai hari ini masih di hadapi di Indonesia. Kemiskinan adalah ketidakmapuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Badan Pusat Statistika). Angka kemiskinan tidak jarang mempengaruhi pembangunan di suatu negara. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia demi menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan (Pyburn & Woodhill, 2014).

Peningkatan angka kemiskinan berbanding lurus dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Demi mengatasi berbagai potensi permasalahan yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk, pemerintah mengimplementasikan kebijakan keluarga berencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 (delapan) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang berbunyi “keluarga berencana merupakan suatu upaya pengaturan atas kelahiran anak, jangka waktu dan usia melahirkan, merencanakan kehamilan, mendapatkan perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak yang dimiliki demi tercapainya keluarga yang berkualitas” (UU no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Kebijakan keluarga berencana tersebut kemudian diturunkan menjadi program Kampung KB yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh Daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah rumah tangga tinggi adalah Kecamatan Purwojati. Hal tersebut melatarbelakangi Kecamatan Purwojati dipilih menjadi salah satu lokasi diimplementasikannya program Kampung KB di Kabupaten Banyumas. Desa Karangmangu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 938 PUS (Kecamatan Purwojati, 2020). Secara lebih rinci, berikut merupakan tabel jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut desa di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 dan 2020 :

Tabel 2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Desa di Kecamatan Purwojati pada tahun 2019 dan 2020.

No.	Desa	Jumlah PUS 2019	Jumlah PUS 2020	Total
1.	Gerduren	774	3	777
2.	Karangtalun Kidul	868	4	872
3.	Kaliurip	375	1	376
4.	Karangtalun Lor	403	1	404
5.	Purwojati	828	4	832
6.	Klapasawit	308	1	309

7.	Karangmangu	935	3	938
8.	Kaliputih	430	0	430
9.	Kaliwangi	712	3	715
10.	Kalitapen	922	3	925
Total		6.555	23	6.578

Sumber : Kecamatan Purwojati, 2021 (data diolah).

Implementasi program kampung KB di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati didasarkan pada Undang-Undang, Keputusan Mendagri tentang pembentukan kampung KB yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Camat tentang Program Kampung KB di Kecamatan Purwojati. Program tersebut diimplementasikan oleh Bupati dan OPD terkait, Camat, penyuluh KB dan Kepala Desa Karangmangu.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini, digunakan 4 (empat) faktor penentu pelaksanaan suatu kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur kebijakan. Berikut adalah hasil analisis untuk masing-masing aspeknya :

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini, komunikasi dinyatakan berhasil apabila implementor mengetahui hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan dan tujuan dari implementasi suatu kebijakan atau program (Subarsono, 2005). Tahapan pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa Karangmangu dalam mengimplementasikan program kampung KB adalah membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan program.

Program Kampung KB di Desa Karangmangu dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti posyandu setiap satu bulan sekali, pengajian rutin dan posyandu lansia di setiap hari Jumat. Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat wajib dalam implementasi program Kampung KB. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang tertulis di dalam petunjuk teknis Kampung KB oleh BKKBN, bahwa partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dalam implementasi program kampung KB di Desa Karangmangu.

Komunikasi yang terjalin antara implementor dengan kelompok sasaran sudah terjalin baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pemahaman implementor mengenai program yang dilaksanakan dan *massivenya* sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengundang pengurus Kampung KB dan melibatkan masyarakat Kampung KB sebagai sasaran sosialisasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah bagian dari faktor penentu efektivitas dari suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh implementor dan sumber daya finansialnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa kompetensi petugas Kampung KB di Desa Karangmangu masih membutuhkan peningkatan. Hal tersebut sudah didukung oleh pengelola Kampung KB dengan mengadakan berbagai macam pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kampung KB, namun masih belum diikuti oleh petugas Kampung KB di Desa Karangmangu. Alasan yang melatarbelakangi tertundanya pelatihan tersebut adalah adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih mewabah di Indonesia.

Ketersediaan sarana dan prasarana di Kampung KB Desa Karangmangu masih belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya dalam menyediakan fasilitas APE (Alat Permainan Edukatif). Sementara fasilitas yang tersedia adalah alat kontrasepsi dan pemberian pelayanan mengenai KB di Puskesmas Desa atau PKD (Pos Kesehatan Desa). Ketersediaan fasilitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, seperti yang disampaikan oleh Sutrisno (2011), bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, diantaranya adalah faktor lingkungan, material, dan kondisi fisik peralatan yang dimiliki.

Implementasi program kampung KB di Desa Karangmangu dilaksanakan dengan menggunakan dana APBDes sebagai sumber dana utamanya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gapura beridentitas kampung KB, komunikasi dalam acara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, dan anggaran transportasi bagi PPKBD dan Sub PPKBD. Terbatasnya sumber dana dari APBDes tersebut menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi program Kampung KB di Desa Karangmangu. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan suatu watak atau sifat dan ciri-ciri yang melekat dalam diri implementor, misalnya dapat berupa komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki oleh petugas dan pengelola program Kampung KB di Desa Karangmangu sudah cukup baik. Sementara

pengawasan dari OPD terkait masih sangat minim. Komitmen merupakan suatu keselarasan kondisi antara karyawan atau pegawai dengan tujuan organisasi (Novita et al, 2016). Tingkat komitmen seseorang berpengaruh terhadap kesetiaan dan loyalitasnya terhadap organisasi. Komitmen tersebut secara langsung akan menimbulkan rasa puas dalam melakukan pekerjaan dan disertai timbal balik dari perusahaan atau organisasi terkait (Taurisa, 2012).

Berkaitan dengan salah karakter yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, pengelola program Kampung KB di Desa Karangmangu sudah menerapkan prinsip demokratis dalam pelaksanaan program yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat di Kampung KB Karangmangu. Keikutsertaan masyarakat adalah wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat, keikutsertaannya dalam suatu penyusunan atau implementasi dari kebijakan atau program merupakan wujud kontribusi masyarakat dalam suatu upaya pembangunan (Adisasmita, 2006:42).

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan bagian dari elemen penting penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut karena struktur birokrasi berpengaruh secara langsung terhadap penyusunan SOP (*standard operating procedures*) yang digunakan sebagai pedoman bagi implementor. Apabila struktur birokrasi bermasalah, akan berdampak langsung bagi hierarki dan prosedur (Clegg, 1997; Caiden, 2009). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa implementasi program Kampung KB di Desa Karangmangu dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan SOP yang telah ditentukan.

Pembagian tugas dan kewenangan bagi implementor sudah cukup jelas dan didasarkan pada struktur organisasi yang telah terbentuk. Pembentukan struktur organisasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya (Mintzberg, 1993). Struktur organisasi dibentuk sebagai suatu sarana kontrol bagi organisasi tersebut (Gibson, *et al*, 2009; Daft, 2010; Hatch & Cunliffe, 2013).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran sudah cukup baik, namun masih membutuhkan perbaikan pada pola koordinasinya, dimulai dari pelaporan hingga evaluasi. Kemudian, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki cukup memadai, namun masih perlu dilakukan peningkatan pada fasilitas program. Respon

dan pemahaman implementor berkaitan dengan program kampung KB sudah cukup baik.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan pemerintah Desa Karangmangu selaku implementor program untuk menciptakan berbagai kegiatan sosial positive bagi masyarakat, misalnya melalui kerjasama dengan penyuluh pertanian terkait pemanfaatan lahan. Pemerintah Desa Karangmangu juga perlu untuk meningkatkan fasilitas baik dari segi kuantitas maupun kualitas demi kelancaran dan keberhasilan jalannya implementasi pada program kampung KB di Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BKKBN. 2015. *Rencana Strategis Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta : BKKBN
- Caiden, G. E. (2009). *A Parabolic Theory Of Bureacracy or Max Weber Though the Looking Glass*. In A Farazman. *Bureaucracy and Administration*. (P. 111). Florida : CRC Press.
- Clegg, S. R. (1997). *Modern Organization : Organization Studies in The Postmodern Word*. London: SAGE Publications.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design* edisi 4. Pustaka Belajar.
- Daft, R. L. (2010). *Organization Theory and Design* (10th ed). Boston : Cengage Learning.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. Donelly, J. H., & Konopaske, R. (2009). *Organizations: Behaviour, Structure, Process* (14th ed). New York, NY: McGraw-Hill.
- Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L., (2013). *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Post Modern Perspectives* (3rd ed). Oxford: Oxford University Press.
- Miles, Matther B, Huberman dan Saldana. 1984. *Qualitative data Analysis : A Methods Book*. Thousands oaks, CA : Sage Publication.
- Mintzberg, H. (1993). *Structure in Five Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Novita, Sunuharjo, B. S., & Ruhma, I. (2016). *Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pyburn & Woodhill. (2014). *Dynamics of Rural Innovation*. Royal Tropical Institute, Amsterdam.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taurisa. (2012). *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*.
- Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8 (3), pp. 176-185.